

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang mengalami kemajuan di bidang ekonomi, Tiongkok akan dianggap sebagai ancaman bagi negara lain. Amerika Serikat sebagai negara *superior* dalam sistem internasional mulai memperhatikan Tiongkok yang mampu mengganggu status hegemoni miliknya. Terdapat banyak hal yang menjadikan Tiongkok sebagai ancaman bagi negara lain antara lain adalah: ideologi komunismenya yang telah menjadi bahan pembicaraan sejak pemerintahan Bush dan faktor budaya Tiongkok. Kedua adalah keadaan geopolitik dan geoekonomi dari Tiongkok. Tiongkok secara geopolitik dapat menjadi negara dengan kekuatan yang besar (*great power*) melihat dari besarnya negara, populasi dan berkembangnya ekonomi¹. Sehingga setelah memahami bahwa AS melihat Tiongkok sebagai ancaman atas kedudukannya, maka seringkali AS mengeluarkan kebijakan yang proteksionis di bidang ekonomi.

Untuk melindungi perusahaan beserta buruhnya AS mengeluarkan kebijakan proteksionis seperti menggunakan *tariff barriers*, *non-tariff barriers*. Bentuk dari *tariff barriers* secara singkat merupakan terdapatnya biaya tambahan berupa pajak atau cukai ketika produk asing masuk ke negara tersebut. Sedangkan *non-tariff barriers* memiliki definisi yang lebih luas, karena NTB merupakan segala bentuk pelarangan yang menyebabkan terhambatnya perdagangan, dapat berupa *sanitary* dan *phytosanitary*, VERs (*voluntary export restraint*) yang memberikan batasan terhadap ekspor negara lain. Baik dari *tariff barriers* dan *non-tariff barriers* merupakan strategi umum yang digunakan dalam perang dagang.

Pada 6 Juli 2018 pada pemerintahan Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif impor dari Tiongkok sebesar 25% atau sebesar US\$34 miliar terhadap 818 produk yang telah ditinjau sebelumnya². Pada hari yang sama Tiongkok juga mengumumkan tarif balasan sebesar 25% atau sebesar US\$34 miliar pada 114 produk impor AS. Peristiwa

¹ New York Times. t.t. "China Threat" or a "Peaceful Rise of China". Tersedia di "<https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/college/coll-china-politics-007.html>" [diakses pada 7 Juli 2021].

² USTR. 2018. "USTR Issues Tariffs on Chinese Products in Response to Unfair Trade Practices" Tersedia di <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/june/ustr-issues-tariffs-chinese-products> [Diakses pada 26 Juli 2021].

tersebut kemudian dikenal sebagai awal dari perang dagang³. Fase kedua adalah pada bulan agustus 2018 dimana kedua negara mengeluarkan peningkatan tarif sebesar US\$16 miliar. Sedangkan tensi perdagangan yang ketiga adalah pada bulan September 2018 dimana AS menaikkan tarif produk impor Tiongkok sebesar US\$200 miliar yang kemudian Tiongkok meretaliasi kenaikan tarif tersebut sebesar US\$60 miliar. Setelah kejadian tersebut, terjadi kesepakatan pada bulan Desember dimana keduanya menyetujui untuk menghentikan sementara tensi perdagangan selama tiga bulan.

Meskipun pada bulan Desember 2018 terjadi kesepakatan untuk mengurangi tarif perdagangan, namun pada Mei 2019 terjadi kenaikan tensi Perang Dagang dimana menaikkan tarif sebesar 25% dimana terjadi kenaikan senilai US\$200 miliar untuk barang-barang impor Tiongkok, dan kenaikan sebesar US\$60 miliar untuk barang impor AS. Selain dari *tariff barriers*, Amerika Serikat juga menggunakan strategi lain berupa *non-tariff barriers* yang diaplikasikan pada tahun 15 Mei 2019 yang menyebabkan pada pelarangan perusahaan Huawei untuk melakukan perdagangan terhadap seluruh perusahaan AS⁴. Sedangkan pada Tiongkok tahun 2018 melakukan devaluasi mata uang, dengan tujuan untuk membuat produk Tiongkok lebih kompetitif⁵.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam dua periode perang dagang AS-Tiongkok, kedua negara menggunakan strategi *tariff barriers* secara umumnya. Selain itu AS juga melakukan strategi NTB berupa pelarangan perusahaan Tiongkok untuk berdagang dengan perusahaan AS. Selain dari *tariff barriers*, Tiongkok pada tahun 2018 menggunakan manipulasi mata uang untuk memperoleh keuntungan lebih. Juga ditemukan fakta bahwa dalam perang dagang, Tiongkok menghindari penggunaan strategi NTB. Sehingga, penelitian ini ditujukan untuk menjawab alasan mengapa Tiongkok tidak menggunakan NTB seperti AS dalam Perang Dagang AS-Tiongkok, dan memilih untuk menggunakan strategi *tariff barriers* plus manipulasi mata uang.

³ CNBC. 2018. "China announces retaliatory tariffs on \$34 billion worth of US goods, including agriculture products". Tersedia di <https://www.cnbc.com/2018/06/15/china-announces-retaliatory-tariffs-on-34-billion-worth-of-us-goods-including-agriculture-products.html> [diakses pada 9 Juli 2021].

⁴ Reuters. 2019. "China's Huawei, 70 affiliates placed on U.S. trade blacklist" Tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huaweitech-idUSKCN1SL2W4> [diakses pada 20 Agustus 2021].

⁵ BBC. 2019. "Yuan fall: Why is China's currency getting weaker?" Tersedia di <https://www.bbc.com/news/business-49245654> [diakses pada 10 Oktober 2021].

I.2 Rumusan Masalah

Mengapa dalam perang dagang AS-Tiongkok 2018-2020, Tiongkok mengedepankan penggunaan strategi *tariff barriers* plus sesekali mengkombinasikannya dengan manipulasi mata uang, dan secara umum menghindari penggunaan strategi Non-Tariff Barriers (NTB)?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dibalik pilihan strategi seperti Tiongkok dalam perang dagang AS-Tiongkok 2018-2020 yang secara khusus mengemukakan kecenderungan pengedepanan strategi *tariff barriers* plus manipulasi mata uang dan penghindaran penggunaan strategi *non-tariff barriers* pada umumnya. Selain mengkonfirmasi bahwa Tiongkok menggunakan strategi *tariff barriers* plus manipulasi mata uang, penelitian ini bermaksud untuk mengelaborasi alasan-alasan atau faktor-faktor dibalik kecenderungan unik Tiongkok dalam perang dagang tersebut. Disebut unik karena umumnya, negara-negara menggunakan kombinasi sekaligus strategi *tariff barriers* dan *non-tariff barriers* dalam perang dagang. Sebagaimana ditunjukkan sekilas dalam latar belakang AS-pun nampaknya menggunakan keduanya. Karena itu, mencari tahu alasan atau faktor dibalik kecenderungan Tiongkok ini, selain menarik juga prospektif untuk mencari tahu bagaimana Tiongkok menjalankan perang dagang dimaksud, tujuan-tujuan apa yang ingin diraih, kapabilitas yang dimiliki Tiongkok, juga probabilitasnya di dalam perang dagang tersebut secara keseluruhan.

I.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka kali ini penulis meneliti tulisan sebelumnya mengenai reaksi dari Tiongkok ketika dihadapkan dengan Perang Dagang, meskipun penulis lain menggunakan istilah lain seperti konflik dagang ataupun *trade dispute*. Dari penelitian sebelumnya tersebut diharapkan muncul suatu pola mengenai bagaimana strategi Tiongkok dalam menghadapi hal tersebut.

Dari tulisan Robert Ross beliau menyatakan bahwa hubungan antara AS-Tiongkok khususnya dibidang ekonomi telah berlangsung bahkan sejak Tiongkok masih berbentuk kerajaan. Keduanya telah melakukan kegiatan perdagangan. Setelah itu hubungan antara keduanya membaik dan AS merupakan pasar terbesar bagi ekspor barang Tiongkok. Namun, kemudian pada akhir pemerintahan Ronald Reagan terjadi konflik dagang yang dimulai dengan pembatasan ekspor dagang tekstil. Tetapi setelah melakukan negosiasi dan mengakhiri kuota terhadap ekspor tekstil tersebut, pada akhirnya membuat kenaikan hingga 90% peningkatan ekspor tekstil Tiongkok. Terlebih karena banyaknya perusahaan besar yang menetap disana seperti Nike. Dari sisi Tiongkok juga tidak menginginkan konflik dengan AS karena kepentingannya tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi militer. Tiongkok pada masa itu menganggap bahwa AS adalah *strategic partner* tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga politik dan pertahanan, meskipun hubungan pada tahun-tahun tersebut hingga

tahun 2000-an adalah pada fokus ekonomi, dapat dilihat bagaimana AS adalah investor terbesar di Tiongkok, hal tersebut mampu meningkatkan tenaga kerja, dan juga perpindahan transfer teknologi. Tiongkok pada masa ini bersikeras untuk memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat karena faktor strategis yang dimilikinya. Normalisasi hubungan antara keduanya diperlukan agar memperoleh akses terhadap teknologi yang lebih maju serta pasar Amerika Serikat, yang menjadi penting ketika Tiongkok ingin untuk membeli properti intelektual milik AS menggunakan mata uang asing. Selain itu, normalisasi adalah penting bagi sumber daya manusia dan buruh di Tiongkok karena adanya *joint venture* ataupun investasi asing yang masuk akan mendorong masyarakat Tiongkok untuk mempelajari mengenai teknologi asing tersebut. Dari sisi AS, normalisasi hubungan dengan Tiongkok akan menetapkan hubungan politik yang stabil, dan melanjutkan reformasi politik di Tiongkok serta menjauhkan dari pengaruh Uni Soviet dalam Perang Dingin⁶.

Dalam Perang Dagang yang kemudian menyangkutpautkan mengenai status MFN (*Most Favoured Nation*) dalam WTO. Dari penelitian Ka Zeng, perilaku Tiongkok terhadap ancaman dagang yang diberikan oleh Amerika Serikat cenderung berhati-hati. Ketika Amerika Serikat berencana memberikan *tariffs barriers* terhadap ekspor mainan, tekstil dan sepatu. Tapi hal tersebut mendapatkan tekanan dari dalam domestik dari kedua negara. Kebijakan dari Presiden Clinton mendapatkan tekanan agar segera menghapuskan *tariff barriers* yang diberikan terhadap ekspor Tiongkok. Sedangkan dari sisi domestik Tiongkok menganggap bahwa perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok merugikan para pekerja buruh Tiongkok. Sehingga pada saat tersebut Tiongkok cenderung untuk berusaha menormalisasi hubungan dengan Amerika Serikat, dapat dilihat bagaimana pejabat Tiongkok sering mengirimkan representatif ke AS untuk negosiasi⁷. Selain itu jika melihat dari situasi konflik status MFN yang menyebabkan adanya *tariff* dan *non-tariff barriers* dapat dilihat bagaimana Tiongkok mengeluarkan kebijakan juga melakukan *tariff barriers* terhadap beberapa produk AS. Dalam perang dagang Tiongkok selalu mempercayai bahwa pada akhirnya keinginan kedua negara adalah untuk berdamai, karena terdapat interdependensi.⁸ Dari tulisan Robert G. Sutter Tiongkok selalu menggunakan pernyataan dimana Tiongkok tidak akan pernah terlihat lemah meskipun terkena pembatasan perdagangan. Dari sisi Tiongkok selalu berusaha untuk menormalisasi hubungan dengan AS. Tiongkok menganggap bahwa Amerika Serikat sebagai negara *superpower* dan Tiongkok

⁶ Robert Ross. 1995. *"Negotiating Cooperation: The United States, 1969-1989"*. Hal. 140-200

⁷ Ka Zeng. 2004. *"Trade threats, Trade Wars"*. University of Michigan Press. Hal. 96-100

⁸ Ka Zeng. 2004. *"Trade threats, Trade Wars"*. University of Michigan Press. Hal. 102-110

melihat hal tersebut agar menghindari konfrontasi militer. Tiongkok menganggap bahwa AS merupakan pasar terbesar, teknologi, dan keberadaannya akan membawa pada investasi masa depan yang penting bagi pertumbuhan Tiongkok⁹.

Dari ketiga penulis tersebut penulis menyimpulkan bahwa dari situasi perang dagang yang pernah dilalui oleh Tiongkok setidaknya terdapat sikap dan pola strategi yang sama pada Tiongkok. Pertama, Tiongkok tidak pernah membalas *non-tariff barriers* yang dilakukan oleh lawan dagangnya. Kedua, Tiongkok membalas dengan kapabilitasnya, yaitu dengan *tariff barriers*, dan mengeluarkan pernyataan kecaman yang dilakukan oleh pejabat publik. Ketiga, Tiongkok selalu berusaha untuk tetap melakukan perdagangan melalui negosiasi. Namun, secara umum tidak mengelaborasi alasan mengapa Tiongkok tidak menggunakan NTB dalam perang dagang. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengisi ruang kosong terhadap peneliti sebelumnya berupa alasan mengapa Tiongkok tidak menggunakan NTB.

I.5 Kerangka Pemikiran

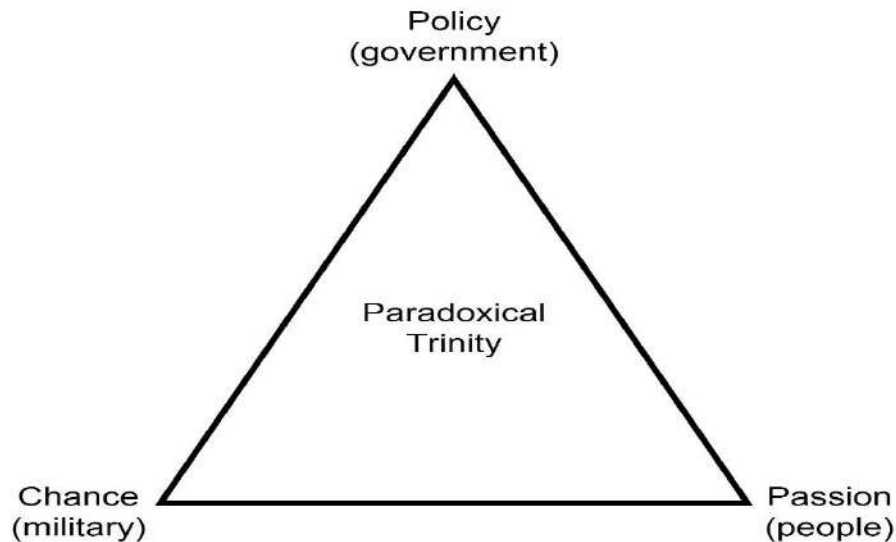
I.5.1. Strategi dan Penggunaannya

Clausewitz dalam tulisannya menyebutkan bahwa strategi merupakan segala cara yang berkaitan dengan tujuan-tujuan berperang. Sedangkan strategi menurut Colin Gray adalah mengacu pada penggunaan kekuatan dan ancaman kekuatan untuk tujuan kebijakan. Semua tentang ancaman atau penggunaan kekerasan terorganisir yang dilakukan oleh unit-unit politik terhadap satu sama lain untuk motif politik. Perang adalah perilaku politik menggunakan agen kekuatan. Strategi adalah jembatan antara kekuatan militer dan tujuan politik. Pertempuran itu penting, tetapi itu hanya bisa menjadi alat, sebuah sarana untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan dari perang menurut Clausewitz bukanlah kemenangan secara militer, melainkan untuk menggagalkan tujuan dari musuh¹⁰. Strategi diklasifikasikan menjadi dua yaitu *military strategy* dan *grand strategy*. Pada strategi militer digunakan untuk tujuan memenangkan berperang, dengan instrumen militer, sedangkan *grand strategy* Clausewitz dalam tulisannya menganggap bahwa sebuah strategi yang disiapkan, demi tujuan-tujuan non-militer, dengan instrumen yang juga non-militer. Seperti penggunaan instrumen ekonomi dalam sejarah perang Napoleon antara Britania Raya dan Perancis yang mampu memberikan batasan perdagangan, dan memberikan dampak buruk secara ekonomi¹¹.

⁹ Robert G Sutter. 2010. *“US-China Relations: Perilous Past, Uncertain Present”*. 3rd Edition. Rowman dan Littlefield. Hal. 100-114

¹⁰ Colin S. Gray *“War, Peace, and International Relations”*. Routledge. Hal. 11

¹¹ Colin S. Gray. *“War, Peace, and International Relations”*. Routledge. Hal. 28



Gambar I.5.1.1 Ilustrasi Trinitas Clausewitz

Sumber: Colin Fleming

Menurut Clausewitz, peperangan dianggap sebagai suatu fenomena yang dapat beradaptasi dalam kasus tertentu. Sehingga Clausewitz mengkomposisikan peperangan sebagai sebuah trinitas yang terdiri dari kekerasan primordial (*primordial violence*), kebencian (*hatred*), dan perseteruan (*enmity*), yang dianggap sebagai kekuatan alami, penggunaan peluang dan kemungkinan, dimana jiwa kreatif dapat bebas berkeliaran dalam peperangan, dan adanya elemen subordinasi sebagai sebuah instrumen kebijakan yang membuatnya tunduk pada akal sehat. Lebih lanjut, Clausewitz menyebutkan bahwa terdapat tiga aspek yang berpengaruh dalam peperangan, pertama adalah rakyat, aspek kedua adalah komandan/pemimpin dan pasukannya, aspek terakhir adalah pemerintah. Selain itu dia menyebutkan terdapat tiga kecenderungan dalam peperangan antara lain adalah: gairah (*passion*) dalam peperangan merupakan berasal dari warganya. Dalam lingkup keberanian, dan bakat yang akan digunakan pada situasi “peluang (*chance*) dan kemungkinan (*propability*)” adalah aspek kedua yaitu tentara dan komandan yang memiliki karakter khusus dalam peperangan. Sedangkan aspek ketiga, pemerintah dalam peperangan memperhitungkan tujuan politik yang ingin dicapai¹².

¹² Colin M Fleming. “Clausewitz’s Timeless Trinity”. Routledge. Hal. 59-60

Ketiga kecenderungan yang disebutkan sebelumnya seperti kode hukum yang berbeda, yang sangat melekat terhadap subjeknya meskipun tetap berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Clausewitz menyatakan bahwa sebuah teori yang mengabaikan salah satu dari mereka atau berusaha untuk memperbaiki hubungan yang sewenang-wenang di antara mereka akan bertentangan dengan kenyataan sedemikian rupa sehingga dianggap tidak berguna dan tidak realistis. Trinitas yang dijabarkan Clausewitz dianggap sebagai teori terpadu dimana tiga tendensi sebagai bagian yang saling mempengaruhi yang menggambarkan ketidakpastian dan kompleksitas dari perang. Dimana Clausewitz menggambarkan bahwa peperangan merupakan sebuah bentuk dari sebuah kebijakan, selanjutnya Colin M. Flemming menginterpretasikan bahwa kebijakan merupakan tendensi dari kegairahan dan kemungkinan¹³. Penjelasan Clausewitz mengenai peperangan tidak kaku, bersifat universal dan dapat digunakan sepanjang masa. Clausewitz mencari elemen universal dari peperangan. Clausewitz juga menambahkan bahwa peperangan terjadi bukan hanya terjadi karena dorongan rasional tetapi juga dorongan yang tidak rasional, meskipun tujuan akhirnya adalah tujuan rasional seperti keuntungan bagi negara salah satu contohnya adalah: faktor moral dan dorongan spiritual¹⁴.

Jika melihat dari tulisan Fleming dapat diasumsikan bahwa trinitas Clausewitz dapat diinterpretasikan sebagai perang-perang modern. Penulis menggunakan trinitas Clausewitz tentang peperangan untuk menjelaskan situasi perang dagang AS-Tiongkok. *Primordial violence, hatred, dan enmity* merupakan kemampuan pemerintah untuk mengolah kapabilitas untuk diaplikasikan dalam perang dagang. Sedangkan pada sisi militer yang awalnya merupakan peluang untuk memperoleh sasaran yang diinginkan oleh negara, dalam perang dagang-pun diaplikasikan demikian dimana suatu negara mempertimbangkan peluang untuk memenangkan perang, atau setidaknya sesuai dengan sasaran. Sedangkan untuk penafsiran *people* atau masyarakat tetap sama dimana mereka memiliki gairah yang berujung pada tujuan akhir dari perang dagang¹⁵.

I.5.2. Perang Dagang, Tahapan, dan Tujuan

Menurut Ka Zeng definisi dari perang dagang adalah sebuah situasi dimana perdagangan antarnegara menjadi konflik internasional perdagangan yang berkepanjangan, berlarut-larut dan berintensitas tinggi, dalam perdagangan tersebut hubungan antarnegara mengalami ketegangan, saling tawar-menawar, dan melakukan retaliasi tarif. Tujuan dari perang dagang sendiri biasanya berasaskan tujuan ekonomi yang secara langsung berkaitan dengan barang yang diperdagangkan atau sektor jasa ekonomi mereka, dan di mana cara yang digunakan

¹³ Ibid. Hal. 70-72

¹⁴ Ibid. Hal. 54-179

¹⁵ Ibid. Hal 8-10

adalah pembatasan atas kebebasan arus barang dan jasa. Selain itu terdapat bentuk perang dagang lainnya yang disebutkan oleh Ka Zeng. Perang dagang tidak hanya bertujuan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga tujuan politik. Perbedaan perang dagang dengan embargo perdagangan dan konflik dagang adalah tujuan awalnya mungkin untuk memberikan sanksi dagang, sedangkan konflik dagang cenderung lebih cepat dan tidak memiliki ketegangan yang tinggi. Selain itu kedua belah pihak harus ikut berperan aktif, sehingga terjadi retaliasi tarif setidaknya satu kali agar dapat disebut sebagai perang dagang. Sehingga berangkat dari definisi tersebut perang dagang memiliki instrumen wajib berupa *tariff barriers* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Selain itu salah satu instrumen perang dagang adalah *non-tariff barriers* yang dapat mengganggu perdagangan bebas antara kedua negara seperti pemberian kuota¹⁶. Meskipun begitu, seringkali *non-tariff barriers* tidak dibalas.



Tabel I.5.2.1. Flow Chart Tahapan Perang Dagang

Sumber: Analisis Penulis

Pola yang dapat dilihat sebelum terjadi perang dagang jika merujuk dari tulisan Ka Zeng adalah awalnya perang dagang dimulai dari negara yang memiliki kekuatan lebih dari rekan dagangnya, seperti Amerika Serikat, yang menganggap bahwa keberadaan negara berkembang yang mampu mengganggu kapasitas dagangnya, perang dagang kemudian dimulai pada dimensi perdagangan saja, yang berpengaruh terhadap kebijakan perdagangan pada dua negara atau lebih seperti dengan memberikan *tariff barriers*. Jika negara yang diberi tarif melakukan retaliasi maka kondisi *Trade War* telah terjadi¹⁷. Dalam menghadapi perang dagang, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan dalam situasi perang dagang yaitu: *tariff barriers*, dan *non-tariff barriers*, dan manipulasi mata uang yang diimplementasikan pada fase perang dagang. Setelah kedua negara saling menyerang dalam perdagangan, maka akan terjadi negosiasi dimana kedua negara saling memberikan tuntutan satu sama

¹⁶ Alan V Deardoff. dan Robert M. Stern. 1998. "Measurement of Nontariff Barriers". The University of Michigan Press. Hal. 3-10

¹⁷ Ka Zeng. 2004. "Trade threats, Trade Wars". University of Michigan Press. Hal 1-6

lainnya. Fase selanjutnya adalah upaya penyelesaian untuk diselesaikan melalui organisasi internasional seperti WTO dan organisasi regional seperti EU yang masing-masing memiliki prosedur penanganan permasalahan perdagangan. Kelebihan dari pendekatan legalistik ini adalah adanya badan internasional yang memiliki kewenangan lebih dari negara, mampu memberikan sanksi apabila melanggar¹⁸. Selanjutnya apabila negosiasi dengan pihak ketiga mampu berhasil maka perang dagang dapat berakhir, sedangkan jika tidak maka perang dagang dapat berlangsung lebih lama lagi.

I.5.3. Strategi dalam Perang Dagang

Setelah membahas mengenai definisi strategi secara umum oleh Clausewitz dan menafsirkannya kedalam situasi perang dagang, Colin M. Fleming menyebutkan bahwa bagaimanapun perang merupakan instrumen rasional yang digunakan seorang pemimpin untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan nasionalnya¹⁹. Sedangkan strategi, menurut Colin Grey merupakan sebuah jembatan antara tujuan dari perang dagang dan instrumen didalamnya seperti penggunaan alat, kekerasan, hal-hal yang dikorbankan untuk tujuan-tujuan politik dan ekonomi. Perang dagang menggunakan strategi yang berbeda dengan perang militer. Jika perang militer menggunakan tentara dan persenjataan militer, perang dagang menggunakan *tariff barriers* dan *non-tariff barriers*.

I.5.3.1 Tariff Barriers

Definisi dari *tariff barriers* merupakan pelarangan yang berbentuk tarif atau pajak biaya tambahan pada bea cukai. *Tariff barriers* biasanya digunakan untuk menambah biaya pada barang-barang juga jasa impor dan ekspor yang merupakan produk dan jasa yang serupa dengan produk yang diproduksi secara domestik, dengan tujuan untuk meningkatkan daya jual produk domestik dan melindungi agar tidak kalah dengan produk asing.

Bentuk dari *tariff barriers* dapat berupa pajak bea masuk dan bea cukai, transit cukai, *specific duty* atau tarif bea khusus tambahan biasanya ditetapkan oleh negara untuk hal-hal yang spesifik seperti jumlah dan berat barang, *ad valorem duty* merupakan tarif bea yang dikenakan dalam bentuk persentase dari nilai barang ataupun jasa, *compound duty* merupakan tarif gabungan antara *ad valorem* dan *specific duty* contohnya seperti penambahan bea cukai sebesar 10% ditambah tambahan tarif sebesar USD\$2.00 setiap

¹⁸ G. Richard Shell. 1995. *Trade Legalism and International Relation Theory: An Analysis of The World Trade Organization*. Duke Law Journal. Hal. 840-848

¹⁹ Colin M Fleming. "Clausewitz's Timeless Trinity". Routledge. Hal. 54

kilogram^{20,21}. Dampak dari tarif akan berdampak pada penurunan PDB negara, gaji, dan lapangan kerja pada jangka waktu yang panjang. Tarif juga akan membuat pajak progresif karena beban pajak yang meningkat akan paling berat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah²².

Penggunaan *tariff barriers* akan lebih mudah dilakukan oleh sebuah negara, karena memiliki data kuantitatif yang lebih mudah untuk dikalkulasi, dan diperhatikan tingkat perubahannya. Oleh karena itu, banyak sekali negara yang menggunakan salah satu kebijakan proteksionis ini terlebih dahulu dibandingkan dengan kebijakan proteksionisme yang lain²³. *Tariff barriers* biasanya menguntungkan negara yang melakukan impor karena memberikan keuntungan atas tambahan biaya atas produk yang masuk²⁴.

I.5.3.2. Non-Tariff Barriers

Dalam tulisan Deardoff dan Stern yang berjudul “*Measurement of Nontariff Barriers*” menjelaskan bahwa *Non-tariff barriers* secara harfiah berarti segala batasan untuk perdagangan tanpa menggunakan bea masuk. Deardoff menjelaskan bahwa NTB tidak dapat didefinisikan karena sangat luas bahkan termasuk juga kebijakan yang belum ditemukan, selama kebijakan tersebut mengganggu perdagangan dan bukan termasuk *tariff barrier* maka digolongkan sebagai NTB. NTB meskipun tidak memiliki definisi yang jelas namun terdapat beberapa bentuk kebijakan yang umum digunakan²⁵.

Salah satu bentuknya intervensi dagang seperti penghapusan subsidi ekspor. Selain itu bentuk kebijakan lain yang digunakan seperti memberikan kuota impor negara lain, penambahan biaya persyaratan dan VERs (Voluntary Export Restraint) yang berarti memberikan kuota terhadap barang yang akan di ekspor, *sanitary and phytosanitary* yang merupakan kebijakan NTB yang berfokus terhadap “keamanan” dari barang yang diimpor sehingga menurut negara penerima diperlukan sanitasi dan fitosanitasi meskipun begitu kebijakan tersebut harus

²⁰ SCMP. “China tariffs: what are they and how are they used”. Tersedia di <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3113157/china-tariffs-what-are-they-and-how-are-they-used> [diakses pada 14 Juli 2021].

²¹ World Bank. t.t. “Glossary”. Tersedia di <https://wits.worldbank.org/glossary.html> [Diakses pada 10 September 2021].

²² Tax Foundation. t.t. “The Impact of Trade and Tariffs on the United States” . Tersedia di <https://taxfoundation.org/impact-of-tariffs-free-trade/> [diakses pada 21 September 2021].

²³ OECD. *Looking beyond Tariffs: The Role of Non-Tariff Barriers in World Trade*. Hal. 20

²⁴ National Geographic. t.t. “Tariffs”. Tersedia di <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/tariffs/> [Diakses pada 10 September 2021].

²⁵ Alan V Deardoff. dan Robert M. Stern. 1998. “Measurement of Nontariff Barriers”. The University of Michigan Press. Hal. 3-10

disertai dengan ilmu pengetahuan²⁶, kebijakan tersebut diperbolehkan oleh WTO asalkan dengan tujuan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dan tidak merupakan kebijakan yang mendiskriminasi negara tertentu. Bahkan termasuk kebijakan yang mampu secara tidak langsung mempengaruhi harga dan kuantitas dari perdagangan. Termasuk juga lisensi, ataupun berupa pelarangan terhadap suatu produk dan perusahaan, pelarangan investasi, regulasi transpor, dan pelarangan terhadap jasa seperti pelarangan mobilitas buruh WNA²⁷. Meskipun begitu Deardoff dan Stern bahwa *non-tariff barriers* definisinya sangat luas dan dapat berkembang.

Dibandingkan dengan *tariff barriers*. NTB dapat berbentuk banyak hal dan cenderung tidak transparan. NTB terdiri dari semua tindakan selain tarif yang membatasi atau mendistorsi arus perdagangan. Selain itu data dari NTB cenderung sulit untuk dianalisis dan dihitung pengaruhnya secara nyata dalam data kuantitatif, tidak seperti *tariff barriers* yang dapat dimonitor perubahannya dan transparan²⁸. NTB biasanya digunakan oleh negara karena mudah untuk digunakan, selain itu Dearadoff juga mengatakan bahwa NTB digunakan karena adanya peraturan yang kaku dari GATT dimana negara-negara telah menandatangani peraturan kaku tersebut. Selain itu NTB juga digunakan karena negara lain melakukan tekanan dan sebagai reaksinya negara tersebut mengeluarkan kebijakan yang rasional seperti kuota. Lebih lanjut, NTB digunakan karena *tariff barriers* tidak berjalan sesuai dengan keinginan negara untuk melindungi perusahaan domestik dan buruhnya²⁹. Sedangkan menurut UNESCAP kebijakan NTB membutuhkan biaya lebih bagi negara, biaya tidak hanya dikeluarkan oleh negara tetapi juga sektor privat karena adanya kebijakan NTB seperti standar-standar kebersihan³⁰.

I.5.3.3. Pengaturan Nilai Mata Uang (Currency Manipulation)

Pengaturan nilai mata uang dalam perdagangan biasanya diperuntukkan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional adalah dengan memposisikan mata uangnya ditingkat yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari kompetitor dagang. Mereka dapat melakukannya dengan secara langsung melemahkan mata uang mereka melalui devaluasi ataupun revaluasi yang berlebihan (meskipun tetap kompetitif) dari nilai tukar tetap atau

²⁶ OECD. *Looking beyond Tariffs: The Role of Non-Tariff Barriers in World Trade*. Hal. 23-25

²⁷ WTO. t.t. "Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures". Tersedia di https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm [diakses pada 21 September 2021].

Brookin

²⁸ OECD. *Looking beyond Tariffs: The Role of Non-Tariff Barriers in World Trade*. Hal. 20

²⁹ Alan V Deardoff. 1987. Why Government Prefer NTB. Hal 193-204

³⁰ UNESCAP. 2019. "Company perspectives on non-tariff measures in Asia-Pacific". Tersedia di <https://www.unescap.org/resources/company-perspectives-non-tariff-measures-asia-pacific#> [diakses pada 29 Oktober 2021]

depresiasi nilai tukar fleksibel. Pengaturan mata uang ini berdampak langsung terhadap ekonomi rekan dagang, karena menimbulkan *trade imbalances* karena muncul fenomena pencurian permintaan (*stealing demand*) dan devaluasi kompetitif (*competitive devaluation*) apalagi ketika dunia dalam kondisi krisis finansial dan pemulihan ekonomi yang melambat³¹.

Manipulasi mata uang efeknya terhadap ekspor dan impor meningkatkan daya saing suatu negara dengan mengurangi harga ekspornya dan menaikkan harga impornya relatif terhadap tingkat yang akan dicapai dalam kondisi pasar, memungkinkannya untuk memperluas ekspor dan menggantikan produksi domestik untuk impor. Peningkatan neraca perdagangan meningkatkan output domestik dan pekerjaan di sektor barang dan jasa yang dapat diperdagangkan. Ini akan menciptakan pekerjaan yang seimbang jika ekonomi belum mencapai kesempatan kerja penuh dan oleh karena itu memiliki sumber daya yang tidak terpakai yang dapat diaktifkan di sektor-sektor tersebut dan di sektor lain yang melayani peningkatan permintaan mereka³². Strategi pengaturan nilai mata uang mempengaruhi secara langsung dari sisi tarif, nilai tukar terapresiasi untuk mengimbangi sebagian kenaikan harga impor, membuat ekspor menjadi lebih mahal bagi negara lain dan memperoleh keuntungan darinya. Kenaikan membuat impor lebih mahal bagi konsumen dan mendorong neraca berjalan naik. Efek gabungan dari tarif dan perubahan nilai tukar adalah untuk mengurangi impor dan ekspor secara merata. Namun, suku bunga yang lebih rendah akan memperburuk *overheating* dari PDB yang sudah disebabkan oleh kenaikan neraca perdagangan. Seiring waktu, PDB yang lebih tinggi akan memberikan tekanan ke atas pada harga, termasuk harga ekspor. Harga yang lebih tinggi menaikkan nilai tukar riil, meskipun nilai tukar nominal dipatok³³.

I.5.4. Perang Dagang, Strategi Perang Dagang dan Reaksi Tiongkok

Dalam mengatasi permainan tarif dan juga ancaman dagang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Setidaknya terdapat reaksi yang dilakukan oleh Tiongkok di masa lampau ketika masa perang dagang dengan AS. Tiongkok memiliki kebijakan yang menyatakan bahwa dalam situasi perang dagang Tiongkok tidak akan takut terhadap konfrontasi atau ancaman yang dilancarkan oleh lawan, tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan konfrontasi, tidak takut akan keberadaan sanksi dagang, dan berusaha melakukan perlawanan terhadap sanksi tersebut. Sehingga meskipun sedang berada dalam tekanan dan ancaman ketika perang dagang, Tiongkok tidak akan gentar terhadapnya, dan berusaha untuk tetap melakukan normalisasi hubungan dengan sekutu dagangnya³⁴.

³¹ C. Fred Bergsten, dan Joseph E. Gagnon. *"Currency Conflict and Trade Policy: A New Strategy for The United States"*. Hal. 1

³² C. Fred Bergsten, dan Joseph E. Gagnon. *"Currency Conflict and Trade Policy: A New Strategy for The United States"*. Hal. 2

³³ Ibid. Hal. 44

³⁴ Ka Zeng. 2004. *"Trade threats, Trade Wars"*. University of Michigan Press Hal. 102-110

Selain itu, jika melihat bahwa di era ini Tiongkok juga melakukan perang dagang dengan Amerika Serikat lagi, maka Tiongkok akan masih memiliki anggapan yang sama bahwa AS merupakan negara *superpower* yang dapat mengganggu keamanan negaranya apabila konflik sampai pada militer, sehingga Tiongkok selalu menghindari hal tersebut dan berfokus pada normalisasi hubungan tanpa bersikap takut terhadap ancaman yang dilontarkan. Selain itu, pejabat Tiongkok sejak lampau mempercayai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh AS berlandaskan pada tujuan ekonomi, sehingga apabila perang dagang dilanjutkan kontinu maka akan merugikan sisi AS juga dan Tiongkok bertaruh pada hal tersebut, karena pada dasarnya Tiongkok menyadari adanya tekanan dari domestik AS, dari sisi perusahaan, yang menginginkan adanya normalisasi dengan Tiongkok³⁵.

I.6 Hipotesis

Dari paparan diatas dapat diasumsikan bahwa alasan Tiongkok mengedepankan penggunaan strategi *tariff barriers* plus manipulasi mata uang dan cenderung menghindari penggunaan strategi *non-tariff barriers* secara umum berkaitan dengan tiga hal. Pertama, konsepsinya terhadap tujuan keterlibatannya dalam perang dagang yaitu untuk segera mengakhiri perang dagang namun tidak takut apabila AS melanjutkan *tariff barriersnya*, Kedua, kapabilitasnya dalam perang dagang yang berupa PDB, nilai mata uang, daya beli masyarakat, dan tingkat ketergantungan dalam perdagangan antara AS-Tiongkok. Ketiga, probabilitasnya dalam perang dagang berupa skema *tariff cycle*. Penggunaan strategi *tariff barriers* plus manipulasi mata uang dipandang lebih sesuai dengan ketiga hal di atas.

I.7 Definisi Konsep Operasional

I.7.1. Perang Dagang

Menurut Ka Zeng definisi dari perang dagang adalah sebuah situasi dimana perdagangan antarnegara menjadi konflik internasional perdagangan yang berkepanjangan, berlarut-larut dan berintensitas tinggi, dalam perdagangan tersebut hubungan antarnegara mengalami ketegangan, saling tawar-menawar, dan melakukan retaliasi tarif. Dalam situasi perang dagang AS-Tiongkok terjadi peningkatan tarif oleh AS yang kemudian Tiongkok membalas dengan *tariff barriers* juga.

I.7.2. Faktor Strategis

Menurut Clausewitz yang dimaksud dengan strategi adalah merupakan segala cara yang berkaitan dengan tujuan-tujuan berperang. Sedangkan strategi menurut Colin Gray adalah mengacu pada penggunaan kekuatan dan ancaman kekuatan untuk tujuan kebijakan. Dengan

³⁵ Robert G Sutter. 2010. *“US-China Relations: Perilous Past, Uncertain Present”*. 3rd Edition. Rowman dan Littlefield. Hal. 100-114

demikian yang dimaksud faktor strategis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang berperan penting dibalik suatu pilihan strategi. Dengan mengembangkan lebih lanjut pemikiran Clausewitz tentang trinitas dasar strategi, faktor-faktor strategis yang dimaksud dalam penelitian ini secara khusus merujuk pada tiga hal yaitu Tujuan, Kapabilitas, dan Probabilitas. Yang dimaksud tujuan adalah sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tiongkok dalam perang dagang. Yang dimaksud kapabilitas adalah modalitas yang dimiliki Tiongkok dalam perang dagang. Sementara probabilitas adalah peluang-peluang yang dimiliki Tiongkok dalam perang dagang.

I.7.2. Tariff Barriers

Definisi dari *Tariff Barriers* menurut World Bank adalah Definisi dari tariff barriers merupakan pelarangan yang berbentuk tarif atau pajak biaya tambahan pada bea cukai. Peningkatan tarif ditujukan terhadap produk ekspor negara lain untuk memperoleh keuntungan lebih. Jika dioperasionalisasikan dalam perang dagang AS-Tiongkok, terjadi empat kali peningkatan tarif yang dilakukan oleh kedua negara, yang awalnya tujuan awalnya adalah untuk memperoleh kerugian, pada akhirnya merugikan kedua negara.

I.7.3. Non-tariff Barriers

Definisi dari *non-tariff barriers* menurut Deardoff dan Stern segala batasan untuk perdagangan tanpa menggunakan bea masuk dalam Dalam kasus perang dagang AS-Tiongkok, salah satu bentuk dari NTB adalah kebijakan Trump yang menunjukan beberapa perusahaan Tiongkok seperti ZTE dan Huawei. Selain itu Pemerintahan Trump juga permasalahan lisensi yang dipermasalahkan dan menyebabkan terganggunya perdagangan sektor teknologi.

I.8 Metodologi Penelitian

I.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti adalah tipe penelitian eksplanatif yang menjelaskan hubungan antara dua variabel ataupun lebih melalui pengujian hipotesis. Variabel yang diujikan adalah kebijakan untuk tidak takut terhadap konfrontasi yang dikeluarkan oleh Tiongkok sebagai alasan dibalik kebijakan Tiongkok untuk tidak membalas proteksionisme bisnis internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan kemudian dianalisis melalui data-data serta perilaku yang dapat membuktikan hipotesis yang dibuat.

I.8.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai ketika Perang Dagang AS-Tiongkok pertama kali dimulai yaitu pada tahun 2018-2020. Meskipun perang dagang masih berlangsung, periode 2018-2020 merupakan periode yang bisa dikaji tersendiri mengingat itu adalah masa-masa ketika AS berada di bawah kepemimpinan Trump. Kendati demikian, penelitian ini tidak akan

banyak membahas perang dagang dari sisi AS. Periode dasarnya hanya untuk memudahkan konsolidasi peristiwa-peristiwa yang ada.

I.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung hipotesis, maka penulis mengumpulkan data sekunder. Data sekunder didapat melalui laman berita juga tulisan dari beberapa ilmuwan, laman resmi pemerintah, penelitian daring yang membahas mengenai perang dagang dan perilaku Tiongkok.

I.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan analisis terhadap data yang berupa informasi yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kebenaran dari hipotesis penulis, sehingga mendapatkan penjelasan. Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis memanfaatkan kerangka pemikiran yang telah disajikan. Kerangka pemikiran digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh untuk membuktikan hipotesis.

I.9 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I adalah bab yang mengandung pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian; Bab II membahas kronologi dari perang dagang AS-Tiongkok yang terbagi menjadi dua periode serta Respon kedua belah pihak, hingga terjadi kesepakatan dagang, beserta tujuan dari perang dagang itu sendiri; Bab III berisi mengenai kapabilitas dari kedua negara sebelum dan sesudah dari perang dagang ; Bab IV merupakan analisis faktor-faktor di balik pilihan strategi Tiongkok dalam perang dagang ; Bab V adalah bab yang berisi kesimpulan.